

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Good Corporate Governance*

2.1.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Ardeno Kurniawan (2012:27) mendefinisikan *Good Corporate*

Governance sebagai berikut :

“*Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola organisasi adalah seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, direksi, pemegang saham dan *stakeholder-stakeholder* lain seperti pegawai, kreditor dan masyarakat.”

Sedangkan pengertian *Good Corporate Governance* menurut Forum

Corporate Governance di Indonesia dalam Hery (2010:11) adalah :

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.”

Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 (2002:pasal 1), mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperlihatkan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.”

Menurut Sukrisno Agoes (2013:101) , definisi *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

“Tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, Dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola yang baik juga sering disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), *Good Corporate Governance* adalah :

“Struktur, sistem dan proses yang digunakan organ perusahaan sebagai upaya yang memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memberikan kepentingan *stakeholders* lainnya berdasarkan norma, etika, budaya dan aturan yang berlaku”.

Dari beberapa definisi mengenai *Good Corporate Governance* di atas dapat penulis simpulkan, bahwa *corporate governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk meningkatkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan, kreditur dan masyarakat sekitar.

2.1.1.2 Prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*

Surat keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (2002:pasal 3), prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* yang dimaksud dalam keputusan ini meliputi:

1. “Transparasi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara aktif;
4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Moh Wahyudin Zarkasy (2008:38) mengemukakan lima prinsip GCG, yaitu:

1. “Transparansi (*Transparency*)
Prinsip dasar, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis perusahaan harus menyediakan informasi yang meterial dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
Prinsip dasar, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. Responsibilitas (*Responsibility*)
Prinsip dasar, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai good corporate governance.
4. Independensi (*Independency*)

Prinsip dasar, untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kesetaraan dan kewajaran (Fairness)

Prinsip dasar, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.”

2.1.1.3 Pengukuran Good Corporate Governance

Menurut Reny dan Denies (2012) Good Corporate Governance dapat diukur dengan menggunakan Corporate Governance Perception Index (CGPI) yang dikembangkan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan diterbitkan di majalah SWA.

Menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG, 2012)

yang menyatakan bahwa:

“Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah pemeringkatan penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui perancangan riset yang mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep corporate governance (CG) melalui perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dengan melaksanakan evaluasi dan studi banding (*benchmarking*).”

Menurut *Indonesian Institue of Corporate Governance* (IICG), CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) (2012) menggunakan empat tahapan penilaian sebagai persyaratan penilaian yang wajib diikuti oleh peserta CGPI.

Empat tahapan tersebut yaitu:

- a. “*Self Assessment*
- b. Kelengkapan dokumen
- c. Penyusunan makalah dan presentasi
- d. Observasi”.

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan penilaian proses riset dalam penentuan nilai *corporate governance* adalah sebagai berikut:

a. *Self Assessment*

Pengisian kuesioner *Self Assessment* terkait penerapan GCG. Tahapan ini melibatkan seluruh organ dan anggota perusahaan serta pihak yang berkepentingan lainnya (*stakeholder*) dalam memberikan tanggapan terhadap implementasi GCG perusahaan.

b. Kelengkapan Dokumen

Penelusuran kelengkapan dokumen dan bukti yang mendukung penerapan GCG. Kelengkapan dokumen mempersyaratkan pemenuhan dokumen terkait penerapan GCG dan praktik bisnis yang beretika serta kelengkapan sistem yang berlaku di perusahaan.

c. Penyusunan Makalah dan Presentasi

Pada tahap ini perusahaan diminta untuk membuat penjelasan tentang kebijakan dan kegiatan perusahaan terkait GCG dalam bentuk makalah dengan memperhatikan sistematika penyusunan yang telah ditentukan.

d. Observasi

e. Tahap klarifikasi dan konfirmasi data dan informasi seputar penilaian melalui diskusi dan kunjungan ke Perusahaan. Diskusi observasi melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan pimpinan manajerial perusahaan.

Adapun bobot nilai yang digunakan untuk menilai GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai berikut:

Tabel 2.1**Tahapan dan Bobot Nilai CGPI (Corporate Governance Perception Index)**

No.	Indikator	Bobot (%)
1.	Self Assessment	15
2.	Kelengkapan Dokumen	25
3.	Penyusunan makalah dan presentasi	12
4.	Observasi ke perusahaan	48

Sumber: www.iicg.org dalam reny dan Denies (2012)

Hasil penelitian CGPI akan dijadikan acuan untuk menentukan perolehan peringkat berdasarkan skor yang telah ditentukan. Hasil peringkat CGPI terbagi menjadi tiga kategori, yaitu cukup terpercaya, terpercaya, dan sangat terpercaya. Ringkasan pemeringkatan berdasarkan skor akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2**Kategori pemeringkat CGPI (Good Corporate Governance Perception Index)**

Skor	Level Terpercaya
85,00-100	Sangat Terpercaya
70,00-84,99	Terpercaya
55,00-69,99	Cukup Terpercaya

Sumber: Corporate Governance Perception Index (CGPI), 2011 dalam majalah SWA (2013)

2.1.1.4 Kriteria *Good Corporate Governance*

Menurut versi *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam Hery (2010:6) ada lima kriteria dari *Good Corporate Governance*, yaitu :

1. *“The rights of shareholders*

Hak para pemegang saham terdiri dari hak untuk menerima informasi yang relevan mengenai perusahaan pada waktu yang tepat, mempunyai peluang untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan termasuk hak dalam hal pembagian keuntungan/ laba perusahaan. Pengendalian terhadap perusahaan haruslah dilakukan secara efisien dan se-transparan mungkin.

2. *The equitable treatment of shareholders*

Adanya perlakuan adil kepada seluruh pemegang saham, khususnya bagi para pemegang saham minoritas atau asing, yang terdiri dari hak atas pengungkapan yang lengkap mengenai segala informasi perusahaan yang material. Seluruh pemegang saham dengan kelas saham yang sama harus diperlakukan secara adil. Anggota corporate board dan manajer diharuskan mengungkapkan segala kepentingan yang material atas setiap transaksi perusahaan yang telah terjadi.

3. *The role of stakeholders in corporate governance*

Peran pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan haruslah diakui melalui penetapan secara hukum. Kerangka kerja GCG harus dapat mendorong kerja sama yang aktif antara pihak perusahaan dengan stakeholders demi menciptakan pekerjaan, kemakmuran, dan perusahaan yang sehat serta finansial.

4. *Disclosure and transparency*

Adanya pengungkapan dan transparansi yang akurat dan tepat waktu atas segala hal yang material terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan, serta masalah lain yang berkaitan dengan karyawan dan stakeholders. Laporan keuangan haruslah diaudit oleh pihak yang independen dan disajikan berdasarkan standar kualitas tertinggi.

5. *The responsibilities of the board*

Kerangka kerja GCG harus menjamin adanya arahan, bimbingan, dan pengaturan yang strategis atas jalannya operasional maupun finansial perusahaan, pemantauan dan pengawasan yang efektif oleh corporate board, dan adanya pertanggung jawaban corporate board kepada perusahaan dan pemegang saham.”

2.1.1.5 Pihak yang Terkait dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Menurut Iman S. Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002:36) pelaksanaan *good corporate governance* yang dilakukan oleh manajemen akan berkaitan dengan pihak – pihak yang berkepentingan antara lain:

1. “Pemegang saham dan Rapat Umum Pemegang Saham
Hak pemegang saham harus dilindungi, agar pemegang saham dapat melaksanakan berdasarkan dengan prosedur yang benar dan ditetapkan oleh perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dewan Komisaris
Dewan Komisaris bertanggungjawab dan berwenang mengawasi tindakan direksi dan jika perlu dapat memberikan nasihat kepada direksi. Fungsi dewan komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham dalam melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi dalam rangka menjalankan kepengurusan perusahaan yang baik dan tanggungjawab.
3. Direksi
Direksi bertugas untuk mengelola perusahaan. Direksi wajib mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan perusahaan dan direksi harus memastikan agar perusahaan melaksanakan tanggungjawab sosialnya memperhatikan kepentingan stakeholder.
4. Eksternal Auditor
Eksternal Auditor harus ditunjukan oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh dewan komisaris berdasarkan usul komite. Eksternal auditor bertanggungjawab memberikan opini atau pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan eksternal auditor adalah opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan tanggungjawab manajemen, tetapi eksternal auditor bertanggungjawab untuk melihat kewajaran pertanyaan – pertanyaan manajemen dalam laporan audit mereka.
5. Komite audit
Dewan Komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan satu atau lebih dewan komisaris. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern perusahaan yang independen dimana setidaknya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan.
6. Auditor Internal
Didalam perusahaan yang menerapkan good corporate governance, fungsi audit internal antara lain dituntut berperan dalam:
 - a. Membantu manajemen dalam menilai risiko – risiko utama yang dihadapi perusahaan dan member nasihat kepada manajemen.
 - b. Mengevaluasi struktur pengendalian internal dan tanggungjawab kepada komite audit.
 - c. Menelaah peraturan corporate governance minimal setahun sekali.

7. Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan harus dilaksanakan oleh salah seorang pejabat perusahaan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan fungsinya. Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretaris perusahaan yang bertanggungjawab kepada direksi perusahaan.
8. Manajer dan Pekerja
Manajer dan Pekerja bertanggungjawab untuk:
 - a. Kelangsungan hidup perusahaan
 - b. Memperpanjang umur perusahaan ke masa depan melalui inovasi, pengembangan manajemen, ekspansi pasar, serta cara lain yang dapat digunakan untuk memberi nilai tambahan kepada perusahaan.
 - c. Menyeimbangkan permintaan dari seluruh kelompok dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuannya.
9. Stakeholders lainnya
Stakeholders diberikan kesempatan untuk memantau pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan kepada direksi mengenai hal tersebut. Perusahaan juga harus memberikan informasi yang diperlukan oleh stakeholders untuk melindungi hak mereka. Perusahaan bekerja sama dengan stakeholders demi kepentingan bersama. Pemerintah terlibat dalam good corporate governance melalui hukum dan peraturan perundang-undangan. Kreditor yang member pinjaman mungkin juga memengaruhi kebijakan perusahaan.”

Menurut Permen BUMN Nomor : Per – 01/MBU/2011 pelaksanaan *good corporate governance* yang dilakukan oleh manajemen akan berkaitan dengan pihak – pihak yang berkepentingan antara lain:

1. “Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Eksternal Auditor
4. Komite audit
5. Auditor Internal
6. Manajer dan Pekerja
7. Stakeholders lainnya.”

2.1.1.6 Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance

Tujuan dan manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* menurut

Agung Adiprasetyo (2004:22) menyatakan bahwa:

Tujuan *Good Corporate Governance* adalah:

1. “Mengoptimalkan (untuk menghindari maksimalisasi) pemberdayaan sumber daya ekonomis dari sebuah usaha. Pemberdayaan sumber daya ekonomis dalam suatu perusahaan dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan menggunakan restrukturisasi, privatisasi dan kerjasama usaha antara BUMN atau perusahaan sehingga akan lebih mudah dalam mendapatkan modal dan meningkatkan kepercayaan pasar dan mendorong arus investasi yang stabil dan berjangka panjang.
2. Memperbesar kemaslahatan secara nasional dari keberadaan sebuah usaha yang dikelola secara baik. Kemaslahatan dari suatu keberadaan usaha menjadi salah satu tujuan penerapan good corporate governance pada perusahaan BUMN yaitu dengan cara meningkatkan kontribusi BUMN pada Negara.
3. Penerapan prestasi yang lebih baik dan penghematan sumber daya dan modal secara ekonomis akan meningkatkan proaktivitas domestik ketika bersaing dipasar internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan daya saing melalui inovasi dan peningkatan efisiensi untuk dapat menyediakan produk barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang kompetitif serta pelayanan yang bermutu tinggi.”

Manfaat dari penerapan *good corporate governance* yaitu:

1. “Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *Corporate Value*.
3. Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
4. Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang.

5. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.”

2.1.1.7 Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Mas Achmad Daniri (2005:15) ada dua faktor yang memegang peranan terhadap keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance*, yaitu:

1. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah berbagai faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *good corporate governance*. Faktor eksternal tersebut diantaranya adalah:

- a. Terdapat sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Adanya dukungan pelaksanaan *good corporate governance* dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat melaksanakan *good corporate governance* dan *clean governance* menuju *good government governance* yang sebenarnya.
- c. Terdapatnya contoh penerapan *good corporate governance* yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan *good corporate governance* yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, sejenis *benchmark* (acuan), terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *good corporate governance* di masyarakat.

2. Faktor Internal

Faktor Internal adalah pendorong keberhasilan praktik good corporate governance yang berasal dari dalam perusahaan. faktor internal tersebut diantaranya adalah:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *good corporate governance* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b. Adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai – nilai good corporate governance.
- c. Adanya manajemen pengendalian resiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah – kaidah standar *good corporate governance*.
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat mengikuti setiap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

Menurut KNKG (2009), keberhasilan pelaksanaan Good Corporate Governance pada perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Komitmen dari organ perusahaan yang dilandasi oleh itikat baik untuk menerapkan GCG secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.

2. Penciptaan sistem pelaksanaan GCG di semua lapisan serta melakukan deseminasi dan sosialisasi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan semua pihak yang ada dalam perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Penyesuaian peraturan dan kebijakan perusahaan dengan sistem pelaksanaan GCG.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran perusahaan mengacu pada pedoman perilaku (*code of conduct*).
5. Dukungan dari pihak *Stakeholders*.
6. Evaluasi pelaksanaan GCG yang dilakukan berkala oleh perusahaan sendiri maupun dengan menunjuk pihak lain yang kompeten dan independen.

2.1.2 Leverage

2.1.2.1 Pengertian Leverage

Menurut Agus Sartono (2010:120) pengertian *Leverage* sebagai berikut:

“*Leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya.”

Menurut Agus Harjito dan Martono (2011:315) menyatakan bahwa pengertian *Leverage* sebagai berikut:

“*Leverage* dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan asset dan sumber dana (*sources of funds*) oleh perusahaan dimana dalam

penggunaan asset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap.”

Menurut Jugiyanto Hartono (2013:282) pengertian *leverage* adalah:

“*Leverage* didefinisikan sebagai nilai buku total utang jangka panjang dibagi dengan total aktiva.”

Dari pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian *leverage* adalah mengukur seberapa besar aktiva/modal perusahaan dibiayai dengan utang.

Untuk mengukur *leverage*, khususnya *leverage* keuangan (*Financial Leverage*) yaitu menggunakan rasio yang disebut rasio *leverage*. Dan sebagai landasan teori atas pernyataan tersebut berikut ini pengertian tentang *leverage* menurut Agus Sawir (2003:13) yaitu:

“*Leverage* merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan hutang dan ekuitas dalam pendanaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya.”

Menurut Mahmud M. Hanafi (2005:83) bahwa:

“*Leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya”.

Menurut Darsono dan Ashari (2005:76) bahwa:

“*Leverage* merupakan rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban dalam jangka panjang, jika perusahaan tersebut dilikuidasi dan menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang.”

Berdasarkan definisi-definisi diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya yang membandingkan hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menilai perusahaan dalam meminjam uang.

2.1.2.1.1 Pengertian Rasio *Leverage*

Suatu perusahaan menjadikan laporan keuangan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan dan dijadikan sebagai pengukuran kinerja perusahaan. Melalui analisis rasio keuangan kita dapat memahami gambaran kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar utang secara tepat waktu (Irham Fahmi 2013:174).

Menurut Agus harjito dan Martono (2011:53) menyatakan pengertian rasio *leverage* sebagai berikut:

“*Leverage* yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari utang (pinjaman).”

Menurut Brealey, Myers, dan Marcus yang dialih bahaskan oleh Bob Sabran M.M (2007:75) menyatakan pengertian rasio *leverage* sebagai berikut:

“Rasio *Leverage* mengukur seberapa besar leverage keuangan yang ditanggung perusahaan. Karena utang meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham dalam masa-masa baik dan mengurangi pada masa-masa buruk, utang tersebut dikatakan menciptakan leverage keuangan.”

Menurut Agus Sartono dalam Irham Fahmi (2013:127) bahwa:

“Rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang.”

Dari pengertian tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.

2.1.2.1.2 Jenis-Jenis Rasio Leverage

Menurut Irham Fahmi (2014:156) pengukuran *leverage* yang bisa digunakan oleh perusahaan yakni sebagai berikut:

1. *Debt to Assets Ratio (Debt Ratio)*

Debt ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Rumus:

$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$
--

2. *Debt to Equity Ratio*

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.

Rumus:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

3. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER) merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Rasio ini berguna untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

Rumus:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Interest Expense}}$$

4. *Times Interest Earned Ratio*

Times Interest Earned ratio yang sering disebut sebagai coverage ratio merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga.

Rumus:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Interest Expense}}$$

5. *Fixed Charge Coverage (FCC)*

Fixed Charge Coverage (FCC) atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai Times Interest Earned Ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (lease contract). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang.

Rumus:

$$\text{FCC} = \frac{\text{EBIT} + \text{Depreciation} + \text{Amortization}}{\text{Interest Expense} + \text{Lease Payments}}$$

6. *Ratio Debt Service Coverage*

Debt Service Coverage, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Jadi sama dengan leverage yang lain, hanya dengan memasukkan angsuran pokok pinjaman.

Rumus:

$$\text{Debt Service Coverage} = \frac{\text{EBITDA}}{\text{Debt Service}}$$

7. *Long Term Debt to Total capitalization*

Long Term Debt to Total capitalization disebut juga dengan utang jangka panjang/total kapitalisasi. Long Term Debt (utang jangka panjang) merupakan sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang, seperti obligasi dan sejenisnya.

Rumus:

$$\frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Total Capitalization}}$$

8. *Cash Flow Adequacy Ratio*

Cash flow Adequacy Ratio disebut juga dengan rasio kecukupan arus kas. Kecukupan arus kas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menutup pengeluaran modal, utang jangka panjang, dan pembayaran dividen setiap tahunnya.

Rumus:

<hr/>

2.1.2.1.3 Manfaat Rasio *Leverage*

Menurut Kasmir (2014:113) menyatakan bahwa keuntungan dengan mengetahui rasio ini adalah sebagai berikut:

1. “Dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap;
3. Mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Guna mengambil keputusan penggunaan sumber dana ke depan.”

2.1.2.2 Jenis – jenis *Leverage*

Menurut Agus Sartono (2008:260), *leverage* terdiri dari:

1. "*Leverage* operasi (*Operating Leverage*), apabila perusahaan memiliki biaya operasi tetap atau biaya modal tetap, maka dikatakan perusahaan menggunakan leverage dengan mengharapkan bahwa perubahan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak yang lebih besar.
2. *Leverage* Finansial (*Financial Leverage*), penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham.
3. *Leverage* Kombinasi (*Combined Leverage*), apabila perusahaan memiliki baik operating leverage maupun financial leverage dalam usaha untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham.
4. Analisis *Break-Even*, perencanaan kegiatan dalam perusahaan yang didasarkan atas perkiraan tingkat output. Pemahaman hubungan antara skala perusahaan, biaya operasi dan EBIT pada berbagai tingkat output disebut dengan analisis volume biaya laba atau cost profit volume analysis."

a) Mengukur *Operating Leverage*

Dengan menggunakan *operating leverage* perusahaan mengharapkan bahwa perubahan penjualan akan mengakibatkan bahwa perubahan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak yang lebih besar. Multiplier effect hasil penggunaan biaya operasi tetap terhadap laba sebelum bunga dan pajak disebut dengan *degree of operating leverage*(DOL). Degree of operating leverage (DOL) dapat juga didefinisikan sebagai presentase perubahan laba sebelum bunga dan pajak sebagai akibat presentase perubahan penjualan.

Rumus:

$$\text{DOL} = \frac{\text{---}}{\text{---}}$$

Adapun rumus menurut Agus Harjito (2011:318) yaitu:

$$\text{DOL } S_{\text{ rupiah}} = \frac{S}{S - VC} = \frac{S}{S - VC - FC + EBIT}$$

Keterangan :

DOL S rupiah = DOL dari penjualan dalam rupiah

S = Penjualan

VC = Biaya Variabel Total (variable cost)

FC = Biaya Tetap (Fixed Cost)

EBIT = Laba operasi sebelum bunga dan pajak

b) Mengukur *Financial leverage*

Perusahaan yang menggunakan sumber dana dengan beban tetap dikatakan bahwa perusahaan mempunyai *financial leverage*. Penggunaan leverage ini dengan harapan agar terjadi perubahan laba per saham (EPS) yang lebih besar daripada perubahan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT). *Multiplier effect* yang dihasilkan karena

penggunaan dana dengan biaya tetap ini disebut dengan degree of financial leverage (DFL)

Rumus:

$$DFL = \frac{EBIT}{EBIT - I}$$

Adapun rumus menurut Agus Harjito (2011:327) yaitu:

$$DOL \text{ S rupiah} = \frac{Q(P - V)}{Q(P - V) - I} = \frac{P - V}{P - V - \frac{I}{Q}}$$

Keterangan :

I = Bunga tahunan yang dibayarkan (interest)

Q = Kuantitas (unit) barang yang diproduksi atau dijual

(P - V) = Margin kontribusi per unit

c) Mengukur *Combined Leverage*

Leverage kombinasi terjadi apabila perusahaan memiliki baik operating leverage maupun financial leverage dalam usahannya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham biasa. *Degree Combined Leverage* (DCL) adalah multiplier effect atas perubahan laba per lembar saham (EPS) karena perubahan penjualan. Dengan

kata lain *degree of combined leverage* (DCL) adalah rasio antara persentase perubahan EPS dengan perubahan presentase penjualan.

Rumus:

$$DCL = \frac{\text{Persentase perubahan EPS}}{\text{Persentase perubahan penjualan}}$$

Adapun rumus menurut Agus Harjito (2011:332) yaitu:

$$DCL \text{ Pada } Q \text{ unit} = \frac{\text{DCL}}{\text{DCL}} = \frac{\text{DCL}}{\text{DCL}}$$

d) Mengukur *Break Even Point* (BEP)

Break even point atau BEP dapat diartikan suatu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan/profit. BEP dapat diartikan suatu keadaan dimana dalam operasi perusahaan, perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi (penghasilan yang dinilai menggunakan total biaya). Tetapi analisa BEP tidak hanya semata-mata untuk mengetahui keadaan perusahaan apakah mencapai titik BEP, akan tetapi analisa BEP mampu memberikan informasi kepada pimpinan perusahaan mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan.

Rumus:

1. *Break even point* dalam unit:

$$\text{BEP} = \frac{\text{FC}}{\text{P} - \text{VC}}$$

2. *Break even point* dalam rupiah:

$$\text{BEP} = \frac{\text{FC}}{1 - \frac{\text{VC}}{\text{S}}}$$

Keterangan :

BEP : Break Even Point

FC : Fixed Cost

VC : Variabel Cost

P : Price per unit

S : Sales Volume

2.1.2.3 Indikator Pengukuran *Leverage*

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan *Debt to Assets Ratio* atau *Debt ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total

utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Rumus:

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Utang}}{\text{Total Aktiva}}$$

Sumber: Irham Fahmi (2014:156)

2.1.2.4 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Menurut Kasmir (2014:153) berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan *leverage* yaitu:

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendirinya yang dimiliki.”

Sementara itu, manfaat *leverage* adalah:

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.”

Intinya adalah dengan analisis rasio *leverage*, perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah diketahui, manajer keuangan dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna menyeimbangkan penggunaan modal. Akhirnya, dengan rasio ini kinerja manajemen selama ini akan terlihat apakah sesuai tujuan perusahaan atau tidak (Kasmir 2014:155).

2.1.3 Corporate Social Responsibility (CSR)

2.1.3.1 Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)

Dalam perkembangannya, konsep CSR tidak memiliki definisi tunggal. Ini terkait pengungkapan dan penjabaran CSR yang dilakukan perusahaan yang juga berbeda-beda. Namun, beberapa yang cukup berpengaruh diantaranya:

Versi Bank Dunia : *“CSR is the commitment of business to Contribute to sustainable economic development working with employees and their respensatives, the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.”*

Dalam bahasa Indonesia, Yusuf Wibisono (2007:7) mengartikan bahwa :

“CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya.”

Versi Uni Eropa : *“CSR is a concept whereby companies integrate social and environment concern in their business operations and their intraction with their stakeholders on voluntary basis”.*

Dalam bahasa Indonesia, Darwin (2004) dalam Rimba (2010:11) mengartikan bahwa:

“Pertanggung jawaban sosial perusahaan atau Corporate social Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum.”

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam Nor Hadi (2011:47) mendefinisikan CSR sebagai berikut:

“Corporate Social Responsibility (CSR) is continuing commitment by business to behave ethically and contributed to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.”

Dalam bahasa Indonesia menurut Nor hadi (2011:48):

“Tanggungjawab sosial perusahaan merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas.”

Menurut Hendrik Budi Untung (2008:1):

“*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.”

Menurut Savio Wermasubun (2008:1) menyebutkan bahwa :

“Istilah *corporate responsibility* mengacu pada tanggung jawab sektor bisnis dalam kaitannya dengan semua pihak yang terlibat, mempengaruhi dan terkena dampak dari sebuah kegiatan bisnis. Meski tujuan utamanya adalah menghasilkan keuntungan, sebuah perusahaan tidak dapat dilepaskan dari masyarakat.”

Sedangkan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40

Tahun 2007 pasal satu butir tiga (2007:2) menyatakan bahwa :

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Belum ada definisi CSR yang secara universal diterima oleh berbagai lembaga. Beberapa definisi CSR dibawah ini menunjukkan keragaman pengertian CSR menurut berbagai organisasi, antara lain sebagai berikut : (wikipedia, 2008; Sukada dan Jalal, 2008) dalam Edi Suharto (2010:123).

1. “*World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*: CSR adalah komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.

2. *International Finance Corporation:*
CSR adalah komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang lebih baik bagi bisnis maupun pembangunan.
3. *Canadian Government:*
Kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan dan sosial ke dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi, dan operasi perusahaan yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkembang.
4. *European Commission:*
Sebuah konsep dengan mana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan.
5. *CSR Asia:*
Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para stakeholders.”

2.1.3.2 Prinsip-prinsip *Social Responsibility*

Ranah tanggung jawab sosial (*social responsibility*) mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Disamping itu, tanggung jawab sosial juga mengandung interpretasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk itu, dalam rangka memudahkan pemahaman dan penyederhanaan, banyak ahli mencoba menggarisbawahi prinsip dasar yang terkandung dalam tanggung jawab sosial (Nor Hadi, 2011).

Nor Hadi (2011:59) mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial (*social responsibility*) menjadi tiga, yaitu:

1. “*Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan

bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, sustainability berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana society memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi masa datang.

2. *Accountability*, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal.
3. *Transparancy*, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Dan transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak lingkungan.”

2.1.3.3 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan yang sering disebut juga sebagai CSR merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*), yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan nada yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku (Yosefa Sayekti dan Wondabio, 2007).

Dalam melakukan pengungkapan CSR perusahaan bebas untuk menentukan format laporan yang akan dibuatnya. Namun, yang terpenting adalah tidak adanya manipulasi seperti yang dilaporkan dalam laporan tersebut harus mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya (Yosefa Sayekti dan

Wondabio, 2007). Pengungkapan tanggungjawab sosial merupakan pengungkapan informasi terkait dengan aktivitas tanggungjawab sosial perusahaan.

2.1.3.4 Indikator Pengukuran *Corporate Social Responsibility*

Untuk mengukur pengungkapan CSR berdasarkan Indikator-indikator menurut Edy Rismanda Sembiring (2005) sebagai berikut :

- 1). “Lingkungan
 1. Pengendalian polusi kegiatan operasi, pengeluaran riset dan pengembangan untuk mengurangi polusi.
 2. Operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi.
 3. Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi.
 4. Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sumber alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi.
 5. Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas.
 6. Penggunaan material daur ulang.
 7. Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan.
 8. Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan.
 9. Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan.
 10. Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah.
 11. Pengelolaan limbah.
 12. Riset mengenai pengelolaan limbah.
 13. Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan.
 14. Perlindungan lingkungan hidup.
- 2). Energi
 15. Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi.
 16. Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi.
 17. Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang.
 18. Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi.
 19. Peningkatan efisiensi energi dan produk.

20. Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk.
21. Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan.
- 3). Kesehatan dan Keselamatan Kerja
 22. Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja.
 23. Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental.
 24. Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja.
 25. Mentaati peraturan standar kesehatan dengan keselamatan kerja.
 26. Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja.
 27. Menetapkan suatu komite keselamatan kerja.
 28. Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja.
 29. Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja.
- 4). Lain-lain Tentang Tenaga Kerja
 30. Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita / orang cacat.
 31. Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja wanita / orang cacat dalam tingkat managerial.
 32. Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita / orang cacat dalam pekerjaan.
 33. Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat.
 34. Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja.
 35. Memberikan bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan.
 36. Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja.
 37. Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan.
 38. Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan.
 39. Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi.
 40. Pengungkapan persentase gaji untuk pensiun.
 41. Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan.
 42. Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan.
 43. Mengungkapkan tingkatan manajerial yang ada.
 44. Mengungkapkan disposisi staff dimana staff ditempatkan.
 45. Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka.
 46. Mengungkapkan statistik tenaga kerja, misalnya penjualan per tenaga kerja.
 47. Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut.
 48. Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja.
 49. Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain.
 50. Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan keputusan dan motivasi kerja.

51. Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan.
 52. Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah.
 53. Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh.
 54. Melaporkan gangguan dan aksitenaga kerja.
 55. Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan
 56. Peningkatan kondisi kerja secara umum.
 57. Informasi reorganisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja.
 58. Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja.
- 5). Produk
59. Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasan.
 60. Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk.
 61. Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk.
 62. Pengungkapan bahwa produk memenuhi standar keselamatan.
 63. Membuat produk lebih aman untuk konsumen.
 64. Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan.
 65. Pengungkapan peningkatan kebersihan/kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan produk.
 66. Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan.
 67. Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan
 68. Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (misalnya, ISO 9000).
- 6). Keterlibatan Masyarakat
69. Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan, dan seni.
 70. Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari mahasiswa/pelajar.
 71. Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat.
 72. Membantu riset media.
 73. Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni.
 74. Membiayai program beasiswa.
 75. Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat.
 76. Mensponsori kampanye nasional.
 77. Mendukung pengembangan industri lokal.
- 7). Umum
78. Pengungkapan tujuan. Kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

79. Informasi hubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebut di atas.”

Perhitungan indeks CSRDI dilakukan dengan menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item CSR dalam instrument penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan (Haniffa, 2005 dalam Yosefa Sayekti dan Wondabio, 2007). Selanjutnya skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan CSRDI adalah sebagai berikut (Hanifa, 2005 dalam Yosefa Sayekti dan Wondabio, 2007):

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

CSRDI_j : *Corporate Social Responsibility Disclosure* Index perusahaan j

X_{ij} : dummy variable: 1 = jika item i diungkapkan; 0= jika item i tidak diungkapkan

n_j : Jumlah item untuk perusahaan j, n_j ≤ 79

2.1.3.5 Jenis-jenis Program *Corporate Social Responsibility*

Menurut Dwi kartini (2009:63) menyebutkan enam kategori aktivitas CSR, yaitu:

1. “Promosi Kegiatan Sosial (*Cause Promotions*)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu.

2. Pemasaran Terkait Kegiatan Sosial (*Cause Related Marketing*)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk.

3. Pemasaran Kemasyarakatan Korporat (*Corporate Philanthropy*)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Kegiatan Filantropi Perusahaan (*Corporate Philanthropy*)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan/paket bantuan atau pelayanan secara Cuma-Cuma.

5. Pekerja Sosial Kemasyarakatan Secara Sukarela (*Community Volunteering*)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, rekan pedagang eceran, atau para pemegang frenchise agar menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.

6. Praktika Bisnis yang Memiliki Tanggung jawab Sosial (*Socially Responsible Business Practice*)

Dalam aktivitas CSR ini, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup.”

2.1.3.6 Tujuan Perusahaan melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Chuck Williams (2001:123) dalam Novi Resturiyani (2012) menyebutkan bahwa:

“Tujuan perusahaan menerapkan CSR agar dapat memberi manfaat yang terbaik bagi stakeholders dengan cara memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika dan kebijakan.”

- 1). “Tanggung jawab ekonomis. Kata kuncinya adalah: *make a profit*. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah pondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (*survive*) dan berkembang.
- 2). Tanggung jawab legal. Kata kuncinya: *obey the law*. Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.
- 3). Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: *be ethical*.
- 4). Tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya: *be a good citizen*. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah *non-fiduciary responsibility*.”

2.1.3.7 Komponen Dasar *Corporate Social Responsibility*

John Elkington (1997) yang dikutip oleh Hasibuan dan Sedyono (2006:73) menyebutkan bahwa *Corporate Social Responsibility* dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu: *people*, *profit*, dan *planet*. Ketiga komponen inilah yang saat ini kerap dijadikan dasar perencanaan, pengungkapan dan evaluasi (pelaporan) program-program *Corporate Social Responsibility* yang kemudian dikenal sebagai *triple bottom line*.

Tabel 2.3

The Triple Bottom Line of Corporate Social Responsibility

	<i>People</i>	<i>Profit</i>	<i>Planet</i>
Definisi	Sebuah bisnis harus bertanggungjawab untuk memajukan dan mensejahterakan sosial serta seluruh stakeholdernya.	Perusahaan tidak boleh hanya memiliki keuntungan bagi organisasinya saja tetapi harus dapat memberi kemajuan ekonomi bagi para stakeholdernya.	Perusahaan harus dapat menggunakan sumber daya alam dengan sangat bertanggungjawab dan menjaga keadaan lingkungan serta memperkecil jumlah limbah produksi.
Jenis kegiatan	Kegiatan kedermawanan yang dilakukan secara tulus untuk membangun masyarakat dan sumber daya manusia.	Tindakan perusahaan untuk terjun langsung di dalam masyarakat untuk memperkuat ketahanan ekonomi.	Penerapan proses produksi yang bersih, aman dan bertanggungjawab.
Contoh	-Basiswa Pendidikan -Pelayanan Kesehatan	-Pembinaan UKM -Bantuan modal dan kredit -Pemberdayaan tenaga lokal	-Pengelolaan limbah -Penanaman pohon -Kampanye lingkungan hidup

Sumber: Hasibuan dan Sedyono (2006:73)

2.1.3.8 Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Sebenarnya apa yang diharapkan dari pelaksanaan CSR selain memberdayakan masyarakat dari sisi perusahaan, jelas agar operasional berjalan lancar tanpa gangguan. Jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak baik bisa dipastikan ada masalah. Pelaksanaan program CSR belum sepenuhnya

diterima oleh masyarakat. Itu disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR. Dari uraian tersebut, tampak bahwa manfaat bagi perusahaan antara lain: (Hendrik Budi Untung, 2008:3):

- a. “Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
 - b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
 - c. Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
 - d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
 - e. Membuka peluang pasar yang lebih luas
 - f. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
 - g. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.
 - h. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
 - i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
 - j. Peluang mendapatkan penghargaan.”
- Ada 4 (empat) manfaat CSR terhadap perusahaan (Wikipedia, 2008 dalam

Edi Suharto, 2010) yaitu:

1. *“Brand differentiation.* Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, CSR bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis dimata publik yang pada gilirannya menciptakan customer loyalty.
2. *Human resources.* Program CSr dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasitinggi.
3. *License to operate.* Perusahaan yang menjalankan CSR dapat mendorong pemerintahan dan publik memberi izin.
4. *Risk management.* Manajemen risiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan.”

2.1.3.9 Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah kepemilikan manajemen, tingkat *leverage*, ukuran perusahaan dan profitabilitas (Heni,2013). Gray et al (2001) dan Sembiring (2005) menunjukkan bahwa size berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan

maka akan semakin besar pengungkapan informasi sosial, Zaleha (2005) dalam Aulia (2010) dan Denies (2012).

Theodora (2011) dalam Denies (2012) juga menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Teori legitimasi memiliki alasan tentang hubungan ukuran dan pengungkapan. Perusahaan yang lebih besar melakukan aktivitas yang lebih banyak sehingga memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat, memiliki lebih banyak pemegang saham yang punya perhatian terhadap program sosial yang dilakukan perusahaan dan laporan tahunan merupakan alat yang efisien untuk mengkomunikasikan informasi ini (Cowen et Al., 1987) dalam Achmad (2007) dan Denies (2012). Hasibuan (2001) dalam Eka (2011) menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio/tingkat kepemilikan publik dalam perusahaan diprediksi akan melakukan tingkat pengungkapan yang lebih luas. Faktor-faktor yang mempengaruhi CSR diteliti oleh Kokubu et al. (2001) dalam Yulia dan Melvie (2011) yaitu mekanisme tata kelola perusahaan /*Good Corporate Governance* (GCG). Mia dan Al Mamun (2011) dalam Rafika (2014) berpendapat bahwa perusahaan dengan leverage tinggi akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang makin banyak.

2.1.4 Kinerja Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Kinerja

Pengertian kinerja menurut Alimiyah & Padji (2003:215)

menyatakan bahwa:

“Kinerja atau performance adalah suatu istilah umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode, sering dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, suatu dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya.”

Menurut Indra Bastian (2001:329) menyebutkan bahwa :

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan, skema strategis (strategic planning) suatu organisasi, secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.”

Menurut Wibowo (2008) menyatakan bahwa definisi kinerja yaitu :

“Kinerja berasal dari pengertian performance. Adapun pengertian makna luas, tidak hanya hasil kerja, tetapi bagaimana proses pekerjaan berlangsung.”

Adapun menurut pendapat yang dikemukakan oleh Amstrong dan Baron dalam Wibowo (2008) adalah :

“Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi.”

Menurut Irham Fahmi (2011:5) adalah sebagai berikut:

“Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu”.

Menurut Indra Bastian (2001) dalam Irham Fahmi (2011:5) bahwa:

“Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan, skema strategis (strategic planning) suatu organisasi, secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.”

2.1.4.2 Pengertian Kinerja keuangan

Menurut Syafarudin (2003 : 96) menyatakan bahwa :

“Kinerja keuangan merupakan adalah mengukur sampai sejauh mana prestasi, peningkatan, posisi, atau performance dari nilai perusahaan yang diukur melalui laporan keuangan baik melalui neraca maupun laba rugi yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan.”

Menurut Irham fahmi (2012:2) bahwa:

“Kinerja Keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”.

Berdasarkan definisi-defini diatas penulis menyimpulkan bahwa Kinerja keuangan adalah Proses dan hasil kerja dari suatu perusahaan yang bisa dijadikan alat ukur pencapaian atau keberhasilan perusahaan.

2.1.4.3 Tahap – Tahap dalam Menganalisis Kinerja Keuangan

Menurut Irham Fahmi (2014 : 4) menyatakan bahwa ada 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum sebagai berikut:

- 1). “ Melakukan review terhadap data laporan keuangan. Review dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang dibuat tersebut dengan penerapan kaedah yang berlaku umum dalam akuntansi sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2). Melakukan perhitungan. Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
- 3). Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya.
Metode yang umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua adalah ;
 - a. Time series analysis, yaitu membandingkan secara antar waktu atau antar periode dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
 - b. Cross sectional approach, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.
- 4). Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh perbankan tersebut.
- 5). Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.”

2.1.4.4 Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat pada analisis laporan keuangan. Salah satu analisis laporan keuangan yang paling umum digunakan adalah analisis rasio keuangan.

Menurut Selamat Riyadi (2006:155):

“Rasio Keuangan adalah hasil perhitungan antara dua macam data keuangan bank, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua data keuangan tersebut yang pada umumnya dinyatakan secara numerik, baik dalam persentase atau kali. Hasil perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pada periode tertentu.”

Menurut Irham Fahmi (2012:15) Analisis Rasio tersebut yaitu di antaranya sebagai berikut:

- 1). “Rasio Likuiditas, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Meliputi cash ratio, current ratio, acid test ratio atau quick ratio.
- 2). Rasio Leverage, yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kebutuhan dana perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Meliputi debt to total assets ratio, debt to equity ratio, dan time interest earned.
- 3). Rasio Aktivitas, yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber dananya. Meliputi inventory turnover, receivable turnover, fixed assets turnover, dan other assets turnover.
- 4). Rasio Profitabilitas, yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Meliputi profit margin, *Return On Investment (ROI)*, *Return on Equity (ROE)*, *Return on Assets (ROA)*, *Earning PerShare (EPS)*.”

a. *Return On Investment (ROI)*

Return on Investment (ROI), dapat digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan, dimana dalam analisis laporan keuangan mempunyai arti yang penting

sebagai salah satu teknik analisis yang biasanya digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

Pengertian ROI menurut Munawir (2002:89) adalah :

“Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dan untuk menghasilkan keuntungan.”

Rumus yang digunakan untuk menghitung ROI adalah:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Aset}} \times 100\%$$

Sumber: Gitman (2012:81)

b. Return On Asset (ROA)

Laba bersih (net income) merupakan ukuran pokok keseluruhan keberhasilan perusahaan. Laba atau kurangnya laba mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapat pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berubah. Jumlah keuntungan (laba) yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan atau trend keuntungan yang meningkat merupakan suatu faktor yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian penganalisa didalam menilai profitabilitas suatu perusahaan (Selamet Riyadi, 2006).

Menurut Mamduh M. Hanafi (2009:159):

“ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Variasi

dalam perhitungan ROA, disamping perhitungan seperti sebelumnya, adalah dengan memasukan biaya pendanaan. Dividen yang merupakan biaya pendanaan dengan saham analisis ROA tidak diperhitungkan. Biaya bunga ditambahkan ke laba yang diperoleh perusahaan.”

Menurut Selamat Riyadi (2006:156):

“*Return on Assets (ROA)* adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total asset bank, rasio ini mengukur tingkat efisiensi pengelolaan asset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Semakin tinggi ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga semakin tinggi tingkat ROA menunjukkan tingkat efisiensi suatu bank. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sedangkan rata-rata total asset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva.”

Rumus yang digunakan untuk menghitung ROA adalah:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset Bank}}$$

Sumber: Mamduh M. Hanafi (2009:159)

c. *Return On Equity (ROE)*

Return On Equity (ROE) merupakan salah satu alat utama investor yang digunakan dalam menilai kelayakan suatu saham. Dalam perhitungan secara umum ROE dihasilkan dari pembagian laba dengan ekuitas selama satu tahun terakhir. Prihadi (2008) dalam Eko Adhy Kurnianto (2011) menyatakan bahwa ROE dapat memberikan beberapa gambaran mengenai perusahaan antara lain:

1. “Kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profitability)
2. Efisiensi perusahaan dalam mengelola asset (asset management)
3. Hutang yang dipakai untuk melakukan usaha (financial leverage).”

Menurut Agus Sartono (2001:124):

“ROE adalah mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang makin besar maka rasio ini juga akan besar.”

Menurut Mamduh M. Hanafi (2009:84):

“ROE merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu.”

Rumus yang digunakan untuk menghitung ROE adalah:

Return On Equity = _____

Sumber: Mamduh M. Hanafi (2009:124)

d. *Earning Per Share (EPS)*

EPS merupakan alat analisis tingkat profitabilitas perusahaan yang menggunakan konsep laba konvensional. EPS adalah salah satu dari dua alat ukur yang sering digunakan untuk mengevaluasi saham biasa disamping PER (Price Earning Ratio) dalam lingkaran keuangan.

Menurut Mamduh M. Hanafi (2009:187):

“*Earning Per Share (EPS)* adalah di samping ROE, rasio keuangan lain yang sering digunakan oleh investor saham atau calon investor saham untuk menganalisis kemampuan perusahaan mencetak laba berdasarkan saham yang dipunyai.”

Menurut Feb Tri Wijayanti (2011):

“*Earning Per Share* (EPS) merupakan laba bersih setelah pajak dikurangi dengan deviden dibagi dengan total seluruh saham.”

Rumus yang digunakan untuk menghitung EPS adalah:

$$\text{Earning Per Share} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak} - \text{Dividen}}{\text{Total Saham}}$$

Sumber: Feb Tri Wijayanti (2011:8)

2.1.4.5 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja

Tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membedakan hasil dan tindakan yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.

Menurut Hanafi (2003 : 69) menyatakan bahwa :

“Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai performing measurement (pengukuran kinerja) adalah kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen dan keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Dengan demikian pengertian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktifitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu.”

Menurut Mulyadi (2001:415) menyebutkan bahwa :

“Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Menurut Mulyadi (2001:416) tujuan pokok penilaian kinerja adalah :

“Untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran.”

Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya, untuk menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Secara formal produk akhir dari hasil pengukuran kinerja diwujudkan dalam suatu laporan yang disebut laporan kinerja.

Menurut Mulyadi (2001:416) menyebutkan bahwa :

“Penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi manajemen yaitu :

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer dan pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.”

2.1.4.6 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut (Munawir, 2007:30) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah likuiditas, Profitabilitas, dan stabilitas ekonomi. Menurut Dani

dan Hasan (2005) dalam Like Monisa Wati (2012), faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan antara lain *Good Corporate Governance* (GCG). Karena prinsip-prinsip dasar dari GCG pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Agus Sartono (2010:120) dalam Shella, Siti Ragil dan Rd Rustam (2014) juga menyatakan bahwa “*Financial leverage* menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiaya investasinya”. Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa analisis leverage ikut berperan dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan. Tariq et al (2013) menyatakan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah ukuran perusahaan, pajak, non debt tax Shield dan likuiditas.

2.1.4.7 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan yaitu:

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Variabel	Persamaan	Perbedaan	Hasil
Silvia Dwi Astuti (2014)	Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Corporate Social Responsibility (X) Kinerja Keuangan Perusahaan (Y)	Membahas tentang CSR dan Kinerja Keuangan Perusahaan	Kinerja keuangan yang digunakan peneliti terdahulu menggunakan ROI dan Return Saham sedangkan dalam penelitian ini menggunakan ROE	Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap Kinerja keuangan
Bolly	Pengaruh	Pengendalian	Variabel Bebas:	Variabel Bebas:	Good

Boliawati (2015)	Penerapan Pengendalian Internal dan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan	Internal dan Good Corporate Governance (X) Kinerja Perusahaan (Y)	Good Corporate Governance	Pengendalian Internal	Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan
Wuryanti K. Dan Siti Khotimah (2015)	Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan	Good Corporate Governance, Leverage, dan Corporate Social Responsibility (X) Kinerja Keuangan (Y)	Variabel Bebas: Good Corporate Governance dan Leverage	Tahun penelitian 2008-2012, penelitian ini 2010-2013. Indikator leverage memakai DER dan penelitian ini memakai Debt Ratio. Kinerja keuangan menggunakan ROA dan penelitian ini memakai ROE.	GCG berpengaruh signifikan terhadap CSR, sedangkan leverage tidak berpengaruh signifikan. GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.
Novi Resturiyani (2012)	Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan	Corporate Social responsibility (X) Kinerja Keuangan (Y)	Membahas Corporate Social Responsibility dan Kinerja Keuangan	Kinerja Keuangan yang peneliti terdahulu gunakan yaitu ROI	Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan bersifat Positif dan

					Sedang.
Nyoman Swastika, Yoga Sindhudiptha, dan Gerianta Wirawan Yasa (2013)	Pengaruh Corporate Social Responsibility Pada Kinerja Keuangan Perusahaan Dan Implikasinya Terhadap Nilai Perusahaan	Corporate Social Responsibility (X) Kinerja keuangan (Y) Nilai Perusahaan (Z)	Variabel Bebas: Corporate Social Responsibility	Variabel Terikat : Nilai perusahaan dan penelitian ini Corporate Social Responsibility dan kinerja keuangan. Perusahaan yang diteliti Manufaktur dan penelitian ini di CGPI	kinerja keuangan perusahaan yang diprosikan dengan ROA tidak mampu memediasi hubungan antara corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan
Kadek Rosiliana, Gede Adi Yuniarta, dan Nyoman Ari Suryadarmawan (2014)	Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Corporate Social Responsibility (X) Kinerja Keuangan (Y)	Membahas Corporate Social Responsibility dan Kinerja Keuangan	kinerja keuangan yang digunakan peneliti terdahulu proksi ROE, ROA, dan ROI	Variabel CSR yang diukur dengan CSDI memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROE. Variabel CSR yang diukur dengan CSDI memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Variabel CSR yang diukur

					dengan CSDI memiliki pengaruh Positif dan signifikan terhadap ROS.
--	--	--	--	--	--

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)

“*Good Corporate Governance* (GCG) akan meningkatkan tanggung jawab perusahaan (CSR) termasuk terhadap lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya. Stakeholder Theory menyatakan bahwa dalam tata kelola organisasi (korporasi), direksi atau pengelola harus memperhatikan pihak atau kelompok yang lebih luas daripada pemegang saham. Dalam teori ini, perusahaan hadir

bukan saja untuk pemegang saham, melainkan untuk semua pemangku kepentingan. Teori ini menegaskan bahwa penting bagi sebuah perusahaan untuk memberikan tanggung jawab terhadap lingkungan (Wuryanti K. dan Siti K. 2015)”. Menurut Sembiring (2005) bahwa ukuran perusahaan, profil perusahaan, dan ukuran Dewan Komisaris (Mekanisme/pengukuran dari Good Corporate Governance) berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan di Indonesia.

Menurut Riha dan Ade (2011), Mewujudkan corporate social responsibility adalah gagasan utama dari penerapan good corporate governance (GCG), hal ini sejalan dengan kesimpulan yang terangkum dalam konferensi CSR yang diselenggarakan oleh Indonesia Business Link (IBL) dalam Murwaningsari, (2009). Penerapan good corporate governance atau dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik muncul sebagai akibat dari maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar, baik di Indonesia maupun luar negeri. Penerapan good corporate governance serta pengungkapan informasi corporate social responsibility merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan. Apabila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.

2.2.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Bekaoui dan Karpik (1989) dalam Rusdianto (2013:46) menjelaskan bahwa keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan mengikuti suatu pengeluaran untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan. Sesuai teori agensi maka manajemen perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para debtholders.

Scott (2000:170) dalam Fahrizqi (2010) menyampaikan pendapat yang mengatakan bahwa semakin tinggi leverage kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba dimasa depan. Perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi akan lebih sedikit mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial, supaya dapat melaporkan laba sekarang yang lebih tinggi (mengurangi biaya pengungkapan).

2.2.3 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan

GCG dirumuskan oleh Jill et al (2005) dalam Wuryanti dan Siti (2015), pada bukunya yang berjudul *Corporate Governance and Accountability*, yaitu *Corporate Governance* adalah system pengawasan dan keseimbangan baik internal maupun eksternal kepada perusahaan, yang menjamin bahwa perusahaan akan melaksanakan kewajibannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan

dengan perusahaan (*stakeholders*) dan bertindak dengan tanggung jawab sosial dalam segala bidang dari bisnis perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Dani dan Hasan (2005) dalam Like (2012), faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan antara lain *Good Corporate Governance* (GCG). Karena prinsip-prinsip dasar dari GCG pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Semakin baik *corporate governance* yang dimiliki suatu perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu perusahaan tersebut karena *Good Corporate Governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya.

2.2.4 Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan

Sumarjo (2010) dalam Wuryanti dan Siti (2015) menyatakan bahwa semakin besar leverage semakin menunjukkan entitas tidak mampu dalam membiayai operasionalnya sendiri karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. Sedangkan semakin kecil *leverage* semakin besar kemampuan entitas dalam membiayai biaya operasional melalui dana internalnya. Perwitasari (2010) dalam Wuryanti dan Siti (2015), semakin besar *leverage* yang dimiliki suatu entitas maka entitas tersebut memiliki kinerja yang buruk.

Menurut Sartono (2010:267) dalam Sheila, Siti dan Raden (2014), “Berbagai rasio finansial dapat dipergunakan untuk mengukur risiko dalam

hubungannya dengan perusahaan yang menggunakan leverage dalam struktur modalnya. Misalnya *total debt to total asset ratio*, *debt to equity ratio*, *time interest earned ratio* dan *fixed charged coverage ratio*". *Debt Ratio* mengukur berapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh kreditur. Semakin rendah rasio hutang maka semakin bagus perusahaan itu. Sebab artinya sebagian kecil aset perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Begitu juga sebaliknya, semakin besar rasio ini berarti makin besar pula leverage perusahaan (Sartono,2011:54. Dalam Shella, Siti dan Raden, 2014)

Penerapan size, leverage, dan growth dalam kinerja perusahaan merupakan kunci sukses bagi perusahaan khususnya dalam sektor keuangan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dan dapat bersaing dengan baik dan dalam bisnis global (Analisa;2011 dalam Dina dan umanto, 2013).

2.2.5 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Gray et al (1987) dalam Wuryanti dan Siti (2015), perusahaan bertanggungjawab secara sosial ketika manajemennya memiliki visi atas kinerja operasionalnya, tidak hanya mengutamakan atas laba perusahaan tetapi juga dalam menjalankan aktivitasnya, memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya.

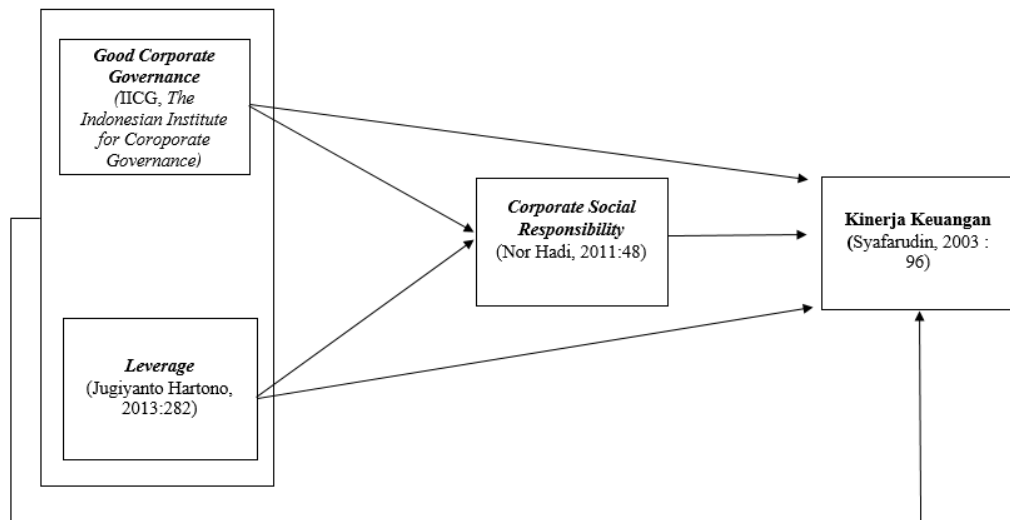
CSR atau tanggung jawab perusahaan merupakan masalah yang sangat penting untuk kegiatan ekonomi karena memperhatikan semua aspek dari aktivitas ekonomi perusahaan dan hubungan dengan *stakeholders* (Geovanni Fiori

et al., 2007 dalam Feb Tri Wijayanti,2011). Chung et al. (2008), beranggapan bahwa perusahaan yang mengungkapkan CSR lebih banyak maka kinerja keuangan perusahaan cenderung akan meningkat (Feb Tri Wijayanti;2011. Dalam Silvia, 2014).

Menurut Nor hadi (2011:128), *social responsibility* merupakan sarana untuk mengurangi berbagai risiko dan complain yang muncul dari illigitimasi masyarakat (stakeholder) yang dapat mengganggu profitabilitas dan going concern perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan kinerja keuangan yang baik, akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk menginformasikan kepada stakeholder-nya, karena perusahaan mampu menunjukkan kepada mereka bahwa perusahaan dapat memenuhi harapan mereka terutama investor dan kreditor.

Tsoutsoura (2004) dalam Ahmad Husnan (2013) dan Silvia (2014), menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang solid maka perusahaan memiliki lebih banyak sumber daya untuk berinvestasi dalam domain kinerja social. Teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan memberikan sinyal-sinyal kepada pihak luar perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Selain informasi keuangan yang diwajibkan, perusahaan juga melakukan pengungkapan yang sifatnya sukarela.

Adapun gambar kerangka pemikiran dari uraian diatas adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1. terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility*

Hipotesis 2. terdapat pengaruh *Leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility*

Hipotesis 3. terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan

Hipotesis 4. terdapat pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan

- Hipotesis 5. terdapat pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan
- Hipotesis 6. terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility*
- Hipotesis 7. terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Keuangan
- Hipotesis 8. terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility* dan dampaknya terhadap Kinerja Keuangan